

Ekonomi Politik Pemberitaan Konflik Persepakbolaan Indonesia

Afdal Makkuraga Putra, Heru Nugroho, Budiawan

Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta, 55281

Email: afdalmakkuraga@gmail.com

Abstract: *This study reveals the interests behind football conflicts news in three newspapers in Indonesia: Kompas, Bola, and Seputar Indonesia. The analysis is based on the political economy of media theory developed by Vincent Mosco, Graham Murdock, and Peter Golding. Using critical paradigm with Norman Fairclough's model of Critical Discourse Analysis (CDA) method, the findings show that the conflicts in Indonesian football have been produced as issues that legitimate the strategic position of the football elite power. The media and journalists were drag into the creation or the legitimation of football elite domination.*

Keywords: *critical discourse analysis, football, political economy of media*

Abstrak: *Penelitian ini mengungkap kepentingan di balik pemberitaan konflik persepakbolaan Indonesia di tiga media cetak, yakni Kompas, Bola dan Seputar Indonesia. Analisis didasarkan pada teori ekonomi politik media yang dikembangkan oleh Vincent Mosco, Graham Murdock, dan Peter Golding. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa konflik persepakbolaan Indonesia diproduksi menjadi isu yang melegitimasi posisi strategis kekuasaan elit persepakbolaan. Media dan wartawan terseret dalam penciptaan atau pengukuhan kekuasaan dominasi elit persepakbolaan tersebut.*

Kata Kunci: *analisis wacana kritis, ekonomi politik media, sepak bola*

Konflik antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) bermula saat Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, memutuskan LPI sebagai kompetisi resmi PSSI menggantikan *Indonesia Super League* (ISL) pada tahun 2012. Keputusan itu tidak didukung bulat oleh semua anggota Komite Eksekutif (Komek) PSSI. Empat dari sembilan anggota Komek yang menolak keputusan itu, yakni La Nyalla Mattalitti, Toni Apriliani, Erwin Dwi Budiawan, dan Roberto Rouw. Keempat

anggota Komek tersebut selalu membantah dan menanggapi miring keputusan Djohar Arifin (Yosia, 2012).

Akibat perlawanan itu, PSSI menindak tegas keempat anggota Komek tersebut. Mereka dinyatakan melanggar Kode Etik PSSI dan dipecat sebagai anggota Komek PSSI. Pelanggaran mereka antara lain, memprovokasi klub dan Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI untuk melakukan pertemuan di Surabaya, berkirim surat ke *Asian Football Confederation* (AFC) dan *Fédération Internationale de Football*

Association (FIFA) terkait kepemilikan 99% saham PSSI di PT Liga Indonesia (PT LI) tanpa izin dari Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, dan menyelenggarakan forum Pengprov PSSI yang mereka sebut sebagai Rapat Akbar Sepak Bola Nasional pada 18 Desember 2011 di Hotel Pullman Jakarta. Rapat itu sekaligus deklarasi pembentukan KPSI dan memilih Toni Apriliansi sebagai ketua sementara (Jasri, 2012).

Setelah terbentuk, KPSI segera mendesak PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna melengserkan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin. Menurut KPSI, Djohar Arifin telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keputusan Kongres Tahunan PSSI di Denpasar, Bali, pada Januari 2011.

Pelanggaran Djohar Arifin di mata KPSI antara lain, *pertama*, melakukan perubahan format kompetisi. *Kedua*, tidak taat asas kepada keputusan Kongres Bali yang menunjuk PTLI sebagai penyelenggara kompetisi. *Ketiga*, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin selalu mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme organisasi, yaitu rapat Komek, seperti pemecatan Alfred Riedel dari jabatan pelatih Tim Nasional (Timnas) senior, mengangkat manajemen Timnas, yaitu Bernhard Limbong dan Arya Abhiseka, serta merehabilitasi hukuman klub (Persema Malang, PSM Makassar, dan Persibo Bojonegoro) yang dihukum turun ke Divisi Utama karena pindah ke LPI, pada Januari 2011. *Keempat*, ketidakmampuan tata kelola organisasi PSSI dengan indikator tidak adanya kepastian implementasi terhadap kompetisi profesional, amatir, dan

pembinaan, serta kursus-kursus lainnya, yang mengakibatkan setiap anggota Komek mengambil langkah masing-masing.

KPSI terus menyuarakan tuntutan KLB. Sebagai langkah menuju KLB, KPSI menggalang gerakan mosi tidak percaya ke Ketua Umum PSSI Djohar Arifin. Gerakan mosi tidak percaya itu ditandatangani 452 anggota PSSI. Pada saat itu KPSI berencana menggelar KLB paling lambat 30 Maret 2012.

Selain KLB, KPSI juga berambisi mengambil alih peran PSSI. Ambisi itu membuat KPSI membentuk Komite Disiplin dan Komite Banding. Tak hanya itu, KPSI juga bermaksud merebut kantor PSSI yang berlokasi di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pengambilalihan kantor tersebut bertujuan untuk memperlancar kegiatan administrasi KPSI.

Menanggapi usulan KLB itu, PSSI membentuk tim verifikasi yang bertugas meneliti keabsahan berkas-berkas KLB yang diterima PSSI. Ketua verifikasi sekaligus Sekretaris Jenderal PSSI, Tri Goetoro, mengumumkan hasil verifikasi pada 10 Januari 2012. Hasilnya, 11 dari 460 surat yang masuk isinya ganda dan tersisa tinggal 449 suara. Setelah dicocokkan dengan jumlah anggota PSSI, dari 449 suara tersebut, 80 di antaranya berstatus bukan anggota dan masih calon anggota, sehingga jumlahnya menjadi 369 suara. Menurut Tri Goetoro, PSSI memiliki surat pakta integritas dari klub Divisi I dan II berjumlah 49 klub. Oleh karenanya jumlah dukungan yang sah untuk KLB hanya 320 suara atau hanya 54,5% jumlah anggota

PSSI. Jumlah tersebut belum memenuhi kuorum untuk menggelar KLB (Kongres Tahunan PSSI, 2012).

Upaya KPSI merebut kantor PSSI tidak terlaksana. Sekretariat Negara, selaku pengelola kompleks olah raga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menolak permohonan KPSI. Usaha melaksanakan KLB juga tidak disetujui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) waktu itu, Andi Mallarangeng. Menurut Andi Mallarangeng, KLB yang diajukan KPSI terlalu prematur untuk menyelesaikan permasalahan. Andi Mallarangeng mengusulkan masing-masing pihak yang berkonflik menyelesaikan masalahnya di arbitrase olahraga.

Perseteteruan makin panjang dan berliku karena masing-masing pihak menyatakan diri sebagai organisasi sah federasi sepak bola Indonesia. KPSI mengaku didukung oleh 452 anggota PSSI. Sebaliknya, kubu Djohar Arifin mengaku masih sah karena dipilih oleh kongres PSSI di Solo pada Juli 2011. Pemerintah juga tetap mengakui Djohar Arifin sebagai Ketua Umum PSSI.

Pada 18 Maret 2012, KPSI menyelenggarakan kongres di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Kongres ini bagi KPSI disebut sebagai KLB PSSI versi KPSI. Pada spanduk yang dipasang di belakang panggung utama kongres tertulis “PSSI-KPSI Extraordinary Congress”. Hasil kongres tersebut menetapkan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua KPSI, Rahim Soekasah sebagai wakil ketua, dan Hinca Panjaitan sebagai sekretaris jenderal.

Sementara itu, PSSI pimpinan Djohar Arifin juga menggelar Kongres PSSI di Palangkaraya, bersamaan dengan kongres KPSI. Hasil kongres itu antara lain menyepakati penguatan skorsing bagi 32 klub yang mengikuti kompetisi di bawah PT LI. Namun klub-klub tersebut tetap berkesempatan untuk kembali ke pangkuan PSSI melalui pengajuan permohonan kepada PSSI dan terpublikasi di media massa. Langkah masing-masing kubu yang berseteru tersebut memperkeruh suasana konflik.

Perhatian media massa terhadap konflik PSSI dan KPSI itu, pada kurun waktu 2011-2012, cukup serius. Hampir semua media memberitakan persoalan-persoalan tersebut melalui perspektif masing-masing. *Kompas*, misalnya, setiap hari, antara Januari-Desember 2011, menurunkan berita terkait PSSI dan KPSI (Tabel 1). Demikian pula dengan *Bola* dan *Sindo*.

Konflik sepak bola di Indonesia memang sarat kepentingan ekonomi dan politik, serta tali-temali dengan industri media. Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyelenggarakan Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) pada Maret 2010, misalnya, pertama kali diungkapkan saat bertemu dengan pengurus

Tabel 1 Pemberitaan Konflik Kepengurusan Sepak Bola Indonesia Januari-Juni 2011

Media	Jumlah Berita
<i>Kompas</i>	136
<i>Sindo</i>	118
<i>Bola</i>	479

Sumber: Diolah dari Kumpulan Kliping Berita PSSI dan LPI di *Kompas*, *Sindo*, dan *Bola*

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, 27 Januari 2010. Pada pertemuan tersebut, SBY meminta PWI membantu pemerintah menggelar KSN pada 29-30 Maret 2010. Pendukung Nurdin Halid menilai PWI memiliki kepentingan dengan KSN karena sejatinya organisasi para wartawan itu tidak mengurus sepak bola. Pendukung Nurdin Halid menilai PWI berkeinginan menjatuhkan Nurdin Halid (Bangun, 2010).

Konflik kepentingan lain terkait laga Timnas senior PSSI di Piala AFF 2010. *TV One* berkesempatan satu pesawat dengan Timnas yang akan bertanding pada putaran final laga pertama melawan Malaysia. Kru *TV One* secara eksklusif mewawancarai sejumlah pemain di dalam pesawat. Perlakuan istimewa itu ternyata diperoleh dengan melalui koneksi Nirwan D. Bakrie, Wakil Ketua Umum PSSI periode 2007-2011, adik kandung Aburizal Bakrie, salah satu pemilik *TV One* yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Tak hanya itu, saat Timnas Indonesia maju ke final AFF, setelah mengalahkan Filipina di semi final, Timnas PSSI menghadiri undangan Aburizal Bakrie guna bersantap malam. Peristiwa itu menjadi sorotan kritik karena dianggap sebagai ajang pencitraan Partai Golkar dan Nurdin Halid.

Gejala konflik kepentingan pada pemberitaan isu tersebut pernah dituduhkan PSSI kepada *Bola*. Direktur Media PSSI, Barry Sihotang, mengadu ke Dewan Pers pada 9 Februari 2011. Sihotang menilai pemberitaan *Bola* bias LPI. PSSI juga menuduh Yesayas

Oktavianus, seorang wartawan *Kompas*, adalah pengurus LPI. PSSI menilai *Bola* memiliki konflik kepentingan dengan pemberitaan LPI (Detik.com, 2011). Sampai konflik ini berakhir, Dewan Pers belum pernah mengklarifikasi kasus tersebut.

MNC *Group*, korporasi yang menaungi *Sindo*, dinilai memiliki konflik kepentingan terkait hak siar LPI pada 2011-2012. *Sindo* dinilai mendiskreditkan ISL dan mencitrapositifkan LPI. Demikian juga dengan *Viva Group*, salah satu anak perusahaan Bakrie yang menaungi *TV One*, *ANTV*, dan *Vivanews.com*. Berita-berita di kelompok *Viva* dianggap mendiskreditkan LPI dan mencitrapositifkan ISL karena hak siar ISL dipegang oleh *TV One* dan *ANTV*. Di samping itu, Nirwan D. Bakrie, pengurus PSSI periode 2007-2011, adalah salah satu pemilik usaha *Bakrie Group*. *Viva Group* memiliki kepentingan komersial dengan ISL.

Konflik kepentingan terjadi bila media memiliki kepentingan dengan peristiwa yang diberitakannya. Kepentingan itu berupa ekonomi atau politik. Kepentingan ekonomi bisa diterjemahkan dalam rangka meraih keuntungan di balik pemberitaan tersebut. Sedangkan kepentingan politik dapat bermakna bila ada kepentingan yang berelasi dengan kekuasaan (Black, 1993, h. 79). Satu hal yang menjadi perhatian penting di balik konflik itu adalah perebutan hak siar liga sepak bola di Indonesia. Sejak 2008, hak siar pertandingan ISL dimonopoli oleh

Viva Group melalui *ANTV* dan *TV One*. Dualisme liga sepak bola, yakni ISL dan LPI, membuka kesempatan bagi media lain, selain *ANTV* dan *TV One*, untuk mendapatkan hak siar pula.

Menurut kaidah jurnalistik, konflik kepentingan sering kali memicu lahirnya bias pemberitaan. Bentuk bias tersebut bisa terwujud pada berita yang memihak kelompok tertentu yang berkonflik (*imbalance*), melakukan stigmatisasi (*prejudice*), dan memperoleh keuntungan pribadi/kelompok atas pemberitaan yang dibuatnya. Konflik kepentingan pemilik media terkadang membuatnya mengintervensi kebijakan redaksional dan menghilangkan independensi para redaktur (Wilson, 1996, h. 166).

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dengan tegas menyebutkan larangan konflik kepentingan. Larangan itu tercantum pada Pasal 1 yang menyatakan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Tafsir Dewan Pers atas pasal ini menyatakan “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

Dilema yang timbul dari praktik konflik kepentingan tersebut yakni terabaikannya hak publik untuk mengetahui informasi yang benar (*neglecting the public interest*) dan mencederai keberagaman (Croteau & Hoynes, 2006, h. 156). Bila informasi yang diterima oleh publik adalah

informasi yang salah, maka opini publik yang timbul adalah opini yang salah pula.

Berangkat dari persoalan di atas, tulisan ini mendiskusikan konstruksi ketiga media cetak, yakni *Kompas*, *Bola*, dan *Sindo* dalam konflik PSSI dan KPSI, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi politik yang diperjuangkan masing-masing media dalam memberitakan konflik PSSI dan KPSI. Tulisan ini dibuat berdasarkan pada penelitian yang mengelaborasi teori-teori ekonomi politik media dengan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Gee (1999, h. 95) menjelaskan wacana (*discourse*) melalui dua aspek. *Pertama*, *discourse* dengan ‘d’ kecil yang merujuk pada bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. *Kedua*, *discourse* dengan ‘D’ besar yang diartikan sebagai praktik penggunaan bahasa yang digabungkan dengan praktik sosial keseharian, seperti cara berpikir, tingkah laku, sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan sang pengguna bahasa. Oleh karena itu, menurut Gee (1999, h. 95), wacana bukan persoalan linguistik semata, tetapi juga menggabungkan unsur-unsur non-linguistik. Teori-teori wacana yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Michel Foucault. Menurut Foucault (dalam Aur, 2005, h. 145), wacana dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, pengklarifikasian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan, serta sistem-sistem abstrak. Wacana tidak lepas dari relasi kekuasaan.

Penelitian tentang topik sepak bola pernah dilakukan oleh David Kennedy dan

Peter Kennedy pada 2011. Penelitian yang berjudul "Toward a Marxist Political Economy of Football Supporters" tersebut mengamati kasus pendukung klub sepak bola Liga Inggris, Everton, melalui pendekatan ekonomi politik Marxis. Kedua peneliti menyoroti rencana perpindahan markas Everton dari Goodison Park ke stadion Kirkby yang digulirkan sejak 2006. Pewujudan rencana tersebut dilakukan manajemen Everton dengan menggandeng pengembang Tesco Plc. Di dalam proposalnya, Tesco berencana membangun supermarket raksasa yang buka 24 jam, restoran, bar, taman bermain, dan hotel berbintang dalam kompleks stadion Kirkby. Rencana itu menuai pro dan kontra dari pendukung fanatik Everton.

Pendukung yang setuju kepindahan itu dianggap telah terjebak propaganda komersialisasi klub. Suporter Everton dijadikan sebagai "komoditas palsu" (*fictitious commodity*) oleh pengembang. Sebaliknya, mereka yang menolak kepindahan tersebut dianggap sebagai kaum tradisional. Kaum tradisional berargumen bahwa antara pendukung dan klub terdapat ikatan emosional. Kepindahan stadion seakan-akan memisahkan jiwa klub dengan pendukungnya. Meskipun Goodison Park merupakan stadion tua, mulai digunakan sejak tahun 1892, tetapi di stadion itulah klub jatuh bangun untuk menegakkan reputasi di kancah persepakbolaan Inggris. Kedua peneliti tidak mengingkari bahwa sepak bola Inggris saat ini bersifat sangat kapitalistik, sehingga suporter dijadikan ladang pemujaan komoditas (*fetishism of commodity*) (Kennedy & Kennedy, 2007).

Sementara itu, Grant (2007) melakukan kajian ekonomi politik sepak bola Inggris dengan judul "*An Analytical Framework for a Political Economy of Football*". Grant menemukan bahwa ekonomi politik sepak bola menjadi lebih esensial semenjak terkooptasi oleh elemen-elemen bisnis. Muncul perdebatan antara paradigma yang memahami sepak bola sebagai sebuah institusi bisnis dan paradigma sepak bola sebagai gerakan kultural dan aktivitas demokrasi. Perdebatan tersebut diwakili oleh industri media yang melihat sepak bola sebagai komoditas, suporter yang melihat sepak bola sebagai kegiatan kesenangan (*pleasure*) dan praktik identitas, serta pemerintah yang berusaha menciptakan ruang regulasi tentang sepak bola dan dijadikan ajang promosi gaya hidup sehat. Grant (2007) menyimpulkan bahwa sepak bola membutuhkan kebijakan politik yang lebih "canggih" untuk memastikan bahwa sepak bola bukan sekadar komoditas. Meskipun peran pemerintah diperlukan, namun tetap berhati-hati agar tidak mencederai semangat kompetisi.

Penelitian Gustavo Madeiro (2007) yang berjudul "*Sport and Power: Globalization and Merchandizing in the Soccer World*" menemukan bahwa pola transfer pemain tak berbeda dengan teori *center-periphery*. Klub-klub kaya Eropa membeli pemain bertalenta dari klub-klub miskin Amerika Latin dengan harga murah. Setelah pemain tersebut mengantar klubnya berjaya di liga masing-masing, mereka dijual dengan harga selangit. Fenomena ini, menurut Madeiro, sesuai

dengan model *center-periphery*. Teori *center-periphery* diperkenalkan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (CEPAL) pada 1960. Teori ini menyatakan bahwa Negara-negara Utara yang kaya dianggap sebagai pusat atau Inti Kapitalisme dan negara-negara Selatan yang miskin merupakan pinggiran. Melalui penaklukan imperial, berbagai tatanan perekonomian pinggiran disedot ke dalam kapitalisme di atas pijakan yang tidak adil. Madeiro (2007) juga mengkritik FIFA yang terlalu mengakomodasi kepentingan kapitalisme sepak bola, sehingga posisi manajemen klub (pemilik media), pemain, dan penonton tidak setara.

Menggunakan konsep ekonomi politik Dennis McQuail (2005, h. 99-100), tulisan ini berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media, dan konten ideologi media. Mengikuti sudut pandang McQuail, lembaga media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Konsekuensinya terlihat dari berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi kepada khalayak yang lebih besar, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada media yang kurang menguntungkan. Menurut McQuail (2005, h. 99-100), karakteristik ekonomi politik media adalah sebagai berikut:

First, economic control and logic are determinant. Second, media structure tends towards concentration. Third, global integration of media develops. Fourth, contents and audience are comodified. Fifth, diversity decreases. Sixth, position and alternative voices are marginalized. Seventh, public interest in communication is subordinated to private interest.

Sementara itu, Vincet Mosco (2010) melihat ekonomi politik media dari dua sudut pandang, yakni yang khusus (sempit) dan yang luas (general). Menurut sudut pandang sempit, ekonomi politik media diartikan sebagai studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan yang saling berkaitan dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya komunikasi. Sedangkan menurut sudut pandang yang lebih luas, ekonomi politik adalah studi tentang kontrol dan kelangsungan hidup dalam kehidupan sosial. Makna kontrol tersebut adalah pengaturan individu dalam sebuah organisasi sebagai anggota kelompok. Kelangsungan hidup berhubungan dengan cara orang memproduksi dan menghasilkan kebutuhannya. Maknanya secara khusus mengacu pada cara masyarakat mengorganisasi diri, mengelola urusan, dan menyesuaikan atau gagal untuk beradaptasi dengan perubahan yang tak terelakkan.

Menurut Golding dan Murdock (1997), pendekatan ekonomi politik mempunyai tiga karakteristik penting. *Pertama*, holistik, yang melihat hubungan saling terkait antara berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di sekitar media dan berusaha melihat berbagai pengaruh dari beragam faktor. *Kedua*, historis, yang mengaitkan posisi media dengan lingkungan global dan kapitalisme, di mana proses perubahan dan perkembangan konstelasi ekonomi merupakan hal terpenting untuk diamati. *Ketiga*, studi ekonomi politik juga berpegang pada falsafah materialisme yang mengacu pada hal-hal nyata dalam realitas kehidupan media.

Golding dan Murdock (1997) berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik media berbeda dengan arus utama ilmu ekonomi dalam hal holisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik, dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas, seperti masalah keadilan, kesamaan, dan barang-barang publik (*public goods*). Golding & Murdock (1997, h. xvi) menyatakannya demikian “*The political economy approach was holistic: it did not abstract the economic or the political from social relations, but examined in full interrelation of social and cultural dynamics*”.

Holistik berarti menunjukkan adanya saling pengaruh antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, sosial, dan kultural. Analisisnya bersifat historis dan secara moral menunjukkan keterkaitan dengan persoalan *public goods*. Aspek historis dalam sifat holisme dalam perspektif ekonomi politik media berpusat pada analisis pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media, komodifikasi, serta peran negara.

Analisis ekonomi politik media memerhatikan perluasan “dominasi” perusahaan media melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar. Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang

kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Konsepsi komunikasi, dalam terminologi ekonomi politik menurut Mosco (2010), ialah desentralisasi komunikasi oleh media (*decentering of media communication*). Artinya, media dilihat sebagai bagian integral mendasar dari proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Hal tersebut menempatkan media dalam kerangka proses produksi dan reproduksi. Oleh karena itu, media dilihat sebagai sarana akumulasi modal. Menurut pandangan ini, media sebagai unit ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga selaras dengan aspek pendidikan, keluarga, dan agama.

Intinya, menurut Mosco (2010), pendekatan ekonomi politik menempatkan subjek komunikasi dalam totalitas sosial yang lebih luas dan cenderung menghindari esensialisme dalam penelitian komunikasi. Mosco (2010) juga menambahkan bahwa komunikasi diartikan sebagai suatu proses pertukaran sosial yang produknya adalah tanda atau perwujudannya dari hubungan sosial (*communication is a social process of exchange, whose product is the mark or embodiment of a social relationship*). Maknanya, ekonomi politik merupakan analisis kelembagaan. Titik fokusnya, misalnya, berkonsentrasi pada bagaimana komunikasi dikonstruksi secara sosial, bagaimana kekuatan sosial berkontribusi terhadap pembentukan saluran komunikasi, dan rangkaian pesan apa yang ditransmisikan melalui saluran tertentu. Komunikasi bukan hanya transmisi informasi, melainkan juga konstruksi sosial makna.

Hal ini telah memberikan kontribusi penting pada bangunan penelitian ekonomi politik tentang bagaimana bisnis (produsen), pemerintah, dan aspek lainnya sebagai kekuatan struktural, berpengaruh pada praktik komunikasi.

METODE

Metode penelitian studi ini adalah *Critical Discourse Analysis* (CDA) model Norman Fairclough yang didukung dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, serta pada perubahan sosial. Penulis berasumsi bahwa pemberitaan media seputar konflik sepakbolaan di Indonesia sarat konflik kepentingan dan kekuasaan. Oleh karena itu, CDA model Fairclough tepat untuk digunakan. Salah satu kelebihan CDA model Fairclough adalah kontribusinya dalam analisis sosial dan budaya, serta menggabungkan tradisi analisis teks dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Fokus utama Fairclough adalah bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial-kultural (Fairclough, 2001). Analisis Wacana Kritis yang diperkenalkan Fairclough adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk mempelajari wacana yang memandang bahasa sebagai bentuk praktik sosial dan berfokus pada cara dominasi sosial dan politik yang direproduksi secara tekstual maupun lisan.

Wacana, dalam CDA, tidak dipahami sebagai studi bahasa semata. Bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Fairclough (2010, h. 28), dalam setiap wacana terdapat *power relation* (relasi kuasa), *class relation* (relasi kelas), *social struggle* (perjuangan sosial), dan *hidden agendas* (agenda tersembunyi).

HASIL

Analisis Teks

Pada isu perseteruan KPSI dan PSSI, *Sindo* menyikapi langkah-langkah KPSI dengan nada sinis. *Sindo* juga menilai kehadiran KPSI hanya membawa kepentingan barisan *status quo* yang sebelumnya tersingkir dari PSSI. *Sindo* setidaknya melibatkan dua elemen narasumber, yakni KPSI yang direlasikan sebagai kelompok ilegal serta pengacau, dan PSSI yang direlasikan sebagai konfederasi sepak bola yang legal serta diakui oleh pemerintah dan FIFA. Pilihan kata dan kalimat yang digunakan *Sindo* antara lain, “Niat KPSI hanya untuk mengganggu kinerja kepengurusan PSSI”, “Ancaman KPSI diabaikan”, “KPSI bukan anggota dari PSSI”, dan “KPSI tidak dikenal FIFA dan AFC maupun lembaga sepak bola manapun”.

Ketika memberitakan isu KPSI dan PSSI, *Sindo* mengidentikkan diri ke PSSI (identitas). Hal tersebut bisa dilihat dari cara *Sindo* menyusun teks-teks beritanya yang selalu mendahulukan kutipan dari kelompok PSSI. Di samping itu, pendapat-pendapat KPSI juga senantiasa diminorkan.

Pendapat KPSI selalu ditempatkan dalam paragraf-paragraf terakhir. Jumlah kutipan dari KPSI juga selalu lebih sedikit daripada kutipan dari PSSI. Hampir seluruh berita yang dibuat *Sindo* tentang KPSI mendahulukan kutipan narasumber PSSI. Sudut pandang berita (*news angle*) selalu berangkat dari sisi PSSI, sehingga semua yang menyangkut KPSI selalu “salah” di mata *Sindo*.

Sindo memuji langkah MNC Group membeli hak siar kompetisi LPI pada 2012. *Sindo* hanya memberitakan hasil-hasil pertandingan LPI. Bagi *Sindo*, LPI adalah kompetisi masa depan Indonesia yang akan melahirkan talenta-talenta terbaik sepak bola Indonesia.

Sebaliknya, *Bola* menyikapi terbentuknya KPSI dengan positif. *Bola* menyebut KPSI terbentuk karena PSSI melakukan pelanggaran statuta dan peraturan organisasi, sehingga membuat mayoritas anggota PSSI jengah. *Bola* menempatkan aktor-aktor (KPSI dan PSSI) pada posisi berhadapan. KPSI direlaskan sebagai penyelamat sepak bola Indonesia dari sergapan Arifin Panigoro dan kawan-kawannya. PSSI direlaskan sebagai organisasi pelanggar statuta dan Djohar Arifin dianggap melakukan politik balas budi ke Arifin Panigoro. Pilihan kata dan kalimat yang digunakan *Bola* untuk merepresentasikan konflik KPSI dan LPI antara lain, “KPSI menempuh jalan benar”, “KPSI merupakan amanah 2/3 anggota PSSI, amanah anggota untuk KLB” dan “Mereka (PSSI Djohar) tidak *eligible* untuk terus menjalankan roda organisasi”.

Bola memosisikan narasumber berita mereka saling berhadapan (diametral). KPSI diposisikan sebagai penyelamat sepak bola Indonesia, oposan PSSI. Sementara, PSSI sering diposisikan sebagai pelanggar statuta, pelaku politik balas budi ke Arifin Panigoro, dan organisasi yang tidak *eligible*.

Ketika memberitakan persetujuan KPSI dan PSSI, *Bola* senantiasa melibatkan elemen narasumber, antara lain pihak KPSI yang seringkali diwakili oleh Toni Apriliani, La Nyalla Mattalitti, dan Hinca Panjaitan serta pihak PSSI yang sering diwakili oleh Djohar Arifin, Tri Goestoro, dan Farid Rahman.

KPSI direlaskan sebagai penyelamat sepak bola Indonesia dari tangan-tangan Arifin Panigoro dan kawan-kawannya yang dinilai melanggar statuta PSSI karena mengabaikan hasil Kongres PSSI di Denpasar, Januari 2011, yang menunjuk PT LI sebagai penyelenggara kompetisi dengan format kompetisi ISL. Selain itu, PSSI, di mata KPSI, telah menodai semangat sportivitas karena memberikan promosi gratis kepada enam klub untuk berlaga di level tertinggi kompetisi, padahal sebelumnya mereka terkena hukuman dan terdegradasi ke Divisi Utama.

Bola menyikapi kehadiran LPI dengan nada sinis. Tabloid ini terus-menerus mengkritik keberadaan LPI yang dinilai tidak profesional karena tidak mampu mempertahankan jumlah klub yang berlaga di LPI. Selain mengkritik LPI, *Bola* juga senantiasa kritis terhadap kebijakan-kebijakan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin. Pilihan kata yang digunakan *Bola* untuk

merepresentasikan LPI antara lain, “Jadwal LPI bermasalah”, “Klub mendapat jadwal neraka”, “Kontestan LPI menyusut”, “LPI jalan tanpa sponsor”, dan “LPI semrawut”.

Sebaliknya, PSSI menilai KPSI sebagai organisasi ilegal karena empat orang pentolannya sudah terkena sanksi. Mereka memprovokasi klub-klub ISL untuk tidak ikut bermain di LPI dan membentuk forum Pengprov tanpa sepengetahuan Ketua Umum PSSI.

Bola mengembangkan strategi identitas dengan mengidentikkan diri ke kelompok KPSI. Hal tersebut terlihat dari cara *Bola* menyusun teks-teks beritanya. *Bola* menyusun teks berita dengan senantiasa menempatkan KPSI sebagai *point of view* berita. *Bola* dengan senantiasa mendahulukan kutipan-kutipan KPSI dengan posisi dominan dan menempatkan kutipan PSSI di akhir teks berita dengan posisi subordinat.

Sementara itu, *Kompas* tidak mengumbar konflik-konflik tersebut. *Kompas* bahkan mendorong terwujudnya rekonsiliasi. *Kompas* nampaknya menghindari pemberitaan masuk ke pusaran konflik. Oleh karena itu, berita-berita *Kompas* tentang PSSI dan KPSI, serta ISL dan LPI, lebih fokus pada hasil-hasil pertandingan liga LPI. Pilihan-pilihan kata yang digunakan *Kompas* antara lain, “Rekonsiliasi lebih memberikan harapan”, “Surat FIFA momentum rekonsiliasi”, dan “Segera memulai proses rekonsiliasi”.

Cara *Kompas* mengambil sudut pandang (*news angle*) berita pada

rekonsiliasi menunjukkan bahwa *Kompas* lebih mendorong pencarian solusi atas konflik tersebut daripada masuk menjadi bagian pusaran konflik. Meskipun demikian, *Kompas* lebih mengidentikkan diri ke LPI dan PSSI daripada KPSI dan ISL. Hal tersebut terlihat dari cara *Kompas* menyusun teks-teks berita berkenaan dengan LPI. Pada minggu awal LPI bergulir, *Kompas* senantiasa menempatkan laporan hasil pertandingan LPI dan ISL dalam satu berita. Namun, hasil pertandingan LPI selalu ditempatkan pada paragraf awal. Jumlah paragraf LPI pun lebih banyak dibanding ISL.

Praktik Wacana

Tiga media cetak tersebut menempatkan Nurdin Halid sebagai biang konflik persepakbolaan Indonesia. Penggambaran Nurdin Halid di tiga media tersebut pada umumnya bersifat negatif. Pilihan kata yang digunakan mengandung nada mencemooh dan menyalahkan Nurdin Halid. Oleh karena itu ketiga media cetak tersebut menjadikan Nurdin Halid sebagai *common enemy*. Sikap media tersebut bisa dipahami karena wacana dominan yang berkembang adalah kuatnya keinginan publik untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi *grand narrative* (narasi besar) sejak reformasi digulirkan pada 1998. Narasi besar merupakan narasi utama yang menjadi dasar dan berkarakter universal karena dapat dipakai sebagai standar untuk mengukur dan menilai narasi yang lain. Narasi besar berada pada posisi determinan terhadap narasi-narasi lain.

Tiga media cetak tersebut menjadikan dirinya sebagai “arena pertarungan” wacana sekaligus ikut bertarung dalam arena konflik. Kelompok *status quo* (PSSI Nurdin Halid) mendefinisikan kelompoknya sebagai kelompok paling sah di mata FIFA dan berhak mengurus sepak bola di Indonesia. Sedangkan kelompok reformis (LPI Arifin Panigoro) dianggap sebagai kelompok yang bersifat lain (*the other*) karena ditentang oleh FIFA. FIFA dijadikan sebagai senjata untuk melegitimasi kelompok dominan. *Kompas* dan *Bola* menunjukkan warna pemberitaan berbeda, meskipun berada pada induk korporasi yang sama, Kompas-Gramedia. Mereka seolah-olah “bermusuhan” karena kebijakan redaksional yang berbeda.

Kedua media tersebut menggambarkan aktor-aktor yang berkonflik dalam struktur oposisi biner, seperti Nurdin Halid (koruptor) < Arifin Panigoro (pembaru), LPI (kompetisi menjanjikan) < ISL (pengekang), dan KPSI (Penyelamat Sepak Bola) < PSSI (tidak *eligible*). Praktik oposisi biner yang dilakukan oleh *Kompas* dan *Bola* menunjukkan bekerjanya kuasa simbolik sebagaimana digambarkan oleh Bourdieu, yakni bahasa/wacana merupakan bagian dari aktivitas di mana sebagian orang mendominasi yang lain. Pelaku sosial yang mampu mengakumulasi modal linguistiknya mempunyai kendali atas mereka yang terbatas modal linguistiknya. Oleh karena itu, bahasa/wacana berperan penting untuk mendefinisikan suatu kelompok, memberikan otoritas bagi pelaku sosial, serta menghadirkan kekuasaan untuk berbicara atas nama kelompok itu (Bourdieu, 1991, h. 166).

Salah satu sintesis dari kuasa simbolik itu adalah instrumen pengetahuan dan komunikasi, kekuasaan simbolik menstrukturkan dan distrukturkan kekuasaan. Kekuasaan simbolik merupakan kuasa untuk mengonstruksi realitas. Media nampaknya tidak menyadari bahwa cara mereka menempatkan subjek yang berkonflik secara *binary* melahirkan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan halus dan tak tampak serta tersembunyi di balik pemaksaan dominasi.

Kompas, *Bola*, dan *Sindo*, sebagai industri media, berusaha memproduksi teks-teks pemberitaan konflik sepak bola di Indonesia dalam rangka menjaga institusi bisnis mereka. Ketiga media tersebut terlihat tunduk pada kepentingan pasar dan kepentingan elit sepak bola nasional. Oleh karena itu, ketiga media tersebut menyajikan berita konflik persepakbolaan di Indonesia dalam metafora pertarungan. Dua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut dibingkai dalam tajuk pertarungan. Satu kelompok dilabeli *status quo*, yaitu mereka yang berada dalam gerbong kepengurusan PSSI Nurdin Halid, dan kelompok lain dijuluki reformis, yaitu bagi mereka yang berada dalam kubu George Toisuta dan Arifin Panigoro.

Ketiga media tersebut, pada tingkatan bisnis, berusaha untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, masing-masing media berusaha mengemas berita konflik persepakbolaan dengan mengungkapkan *commonsense* publik yang bisa dipahami oleh imaji khalayak, misalnya *commonsense* publik

tentang wacana LPI versus Nurdin Halid dan KPSI versus PSSI yang dibuat dalam nuansa dikotomi salah dan benar. Masing-masing media terjebak dalam perdebatan dikotomi, sesuai atau tidaknya kedua pihak dengan statuta FIFA dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Di dalam dimensi ekonomi dan politik, peristiwa konflik persepakbolaan Indonesia diproduksi menjadi isu yang melegitimasi posisi strategis kekuasaan elit persepakbolaan. Media dan wartawan terhanyut dalam penciptaan atau pengukuhan kekuasaan dominasi elit persepakbolaan. Peristiwa itu dikemas dalam teks sedemikian rupa, sehingga menarik bagi publik. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh media adalah memberi kesan dramatis atas suatu peristiwa. Media dan wartawan sering terhanyut dalam praktik pemberian kesan bombastis kepada khalayak dengan pemberitaan yang mengarah pada penciptaan atau pengukuhan stereotip.

Cara media memberitakan konflik tersebut menunjukkan rapuhnya independensi media. Untuk menjaga netralitas, media dituntut tidak memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai. Namun, dalam kasus konflik kepengurusan sepak bola Indonesia, media menabrak rambu-rambu tersebut. Media membela mati-matian suatu isu bila hal itu menyangkut kepentingannya dan membiarkannya bila tidak berkenaan dengan kepentingannya. Semua ditentukan berdasarkan prinsip pragmatisme. Wartawan dituntut tidak menjadi bagian dari peristiwa yang mereka

liput. Fakta menunjukkan bahwa masing-masing media tidak mengindahkan rambu tersebut. Wartawan dari masing-masing media menjadi bagian dari konflik tersebut. Misalnya, Yesayas Octavianus (*Kompas*) yang memiliki kedekatan khusus dengan Arifin Panigoro (Inisiator LPI), dan *Sindo*, secara institusi, dekat dengan pengurus PSSI, Djohar Arifin, karena membeli hak siar LPI. Inilah yang mendorong munculnya konflik kepentingan pada pemberitaan konflik persepakbolaan tersebut.

Di balik cara pemberitaan media yang berbeda-beda itu, tampaknya muara dari itu semua adalah perebutan hak siar pertandingan sepak bola di Indonesia. Hak siar adalah kepentingan tersembunyi yang dipendam oleh Kompas-Gramedia dan MNC *Group*. Hal tersebut terlihat saat *Kompas TV*, bersama MNC *Group*, menyiarkan pertandingan *play off* LPI pada Oktober 2013. Pada 2014, *K-Vision* (divisi TV berbayar Kompas-Gramedia) dan MNC *Group* menjadi pemegang hak siar ISL.

Untuk memuluskan langkah-langkah meraih keuntungan dari sepak bola, CEO MNC *Group*, Hary Tanoesoedibjo, “rela” menjadi Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). AFI adalah salah satu divisi di bawah naungan PSSI. Padahal, dalam rekam jejaknya, Hari Tanoesoedibjo belum pernah bersinggungan dengan sepak bola.

MNC *Group* menempuh strategi sinergi antarmedia. Strategi ini menciptakan efisiensi yang membawa pengaruh pada biaya yang dikeluarkan dan profit yang diperoleh. Guna mendongkrak keuntungan,

Sindo tanpa segan-segan melakukan praktik diskriminatif terhadap ISL. Kompetisi tandingan dari LPI ini tidak diberitakan sama sekali.

Menurut Decky Irawan Jasri, wartawan *Sindo*, sejak saat itu warna pemberitaan *Sindo* mengenai konflik PSSI berubah drastis. *Sindo* yang awalnya bersikap netral berubah menjadi pembela PSSI dan LPI. KPSI dan ISL dikecilkan, bahkan tidak diberitakan. Produksi teks selalu mengutamakan narasumber PSSI dan LPI. Pendapat narasumber dari pihak KPSI, seperti La Nyalla dan Toni Apriliani, jarang dikutip. “Keputusan induk usaha membeli hak siar LPI membuat semua media di bawah MNC Group mendukung keputusan induk. Kita yang di koran juga harus seirama dengan grup” (Wawancara dengan Decky Irawan Jasri, 14 Desember 2014).

Hattrick, halaman olahraga *Sindo*, dipenuhi pemberitaan seputar LPI, seperti prediksi pertandingan LPI, ulasan hasil pertandingan LPI dan profil klub atau pemain LPI. *Sindo* tidak memberitakan prediksi atau hasil pertandingan di ISL.

Menurut Decky, keputusan MNC membeli hak siar LPI menjadi dilema bagi *Sindo* karena kenyataannya kompetisi ISL jauh lebih baik daripada LPI. Klub-klub yang berlaga di ISL adalah klub-klub papan atas Indonesia. Pengelolaan PT LI juga lebih profesional dibanding PT Liga Primer Indonesia Sportindo (PT LPIS). Basis penonton ISL juga lebih banyak dibanding LPI. “Kita dilematis saat itu. Saya, selama satu musim, hanya menulis Persija yang di

LPI. Sementara yang ada di ISL tidak ditulis. Padahal, Persija LPI itu tidak bermarkas di Jakarta. Mereka keliling, kadang-kadang di Madiun” (Wawancara dengan Decky Irawan Jasri, 14 Desember 2014).

Konflik tersebut juga menjadi momentum untuk mengakhiri dominasi kelompok Bakrie (*ANTV & TV One*) terhadap pengelolaan hak siar pertandingan ISL sejak 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan memperebutkan tayangan ISL memasuki babak baru dengan munculnya Kompas-Gramedia (*K-Vision*). Namun, pada sisi lain, sekaligus menunjukkan terjadinya praktik oligopoli dalam penentuan hak siar tersebut. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menengarai terjadi persaingan usaha tidak sehat pada penayangan kompetisi sepak bola nasional itu.

Tingginya animo masyarakat untuk menonton pertandingan sepak bola membuat semua yang berkaitan dengan sepak bola menjadi objek komodifikasi. Hak siar memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, pemilik media berusaha memperolehnya. Keberpihakan MNC terhadap LPI tidak lepas dari kebijakan grup media tersebut membeli hak siar LPI. Pembelian hak siar LPI tersebut melancarkan jalan memiliki hak siar seluruh pertandingan tim nasional Indonesia.

Praktik Sosial Kultural

Berita sepak bola tidak bisa lagi dianggap sebagai wacana pinggiran yang bersifat remeh-temeh. Berita sepak bola telah sejajar dengan berita-berita lain. Tahun 2005 menjadi titik balik industri media cetak di Indonesia. Industri ini mengalami

titik jenuh yang ditandai dengan terus tergerusnya jumlah pembaca yang beralih ke media *online*. Namun, pemain-pemain besar dan berpengalaman terus melakukan konsentrasi kepemilikan, misalnya praktik yang dilakukan oleh dua perusahaan besar media, yakni Kompas-Gramedia dan *Jawa Pos*. Kompas-Gramedia berkembang melalui *Tribun Media*, sedangkan *Jawa Pos* melalui *Radar*.

Permintaan pembaca tentang berita-berita olah raga justru berkembang signifikan. Data Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), pada 2010, menunjukkan bahwa minat mengikuti berita sepak bola menjadi alasan kelima terbesar konsumen laki-laki dan perempuan pembaca surat kabar.

Jika dilihat dari sisi status sosial ekonomi (SES), golongan AB menempatkan berita sepak bola pada urutan ketujuh alasan mereka membaca koran, golongan C kelima, dan DE keenam. Umur 20-29 tahun adalah kelompok usia yang paling menggemari berita sepak bola. Di Jakarta, misalnya, pada 2010 harian olahraga *Top Skor* menempati peringkat ketiga koran harian terbesar dengan oplah 250 ribu eksemplar setiap hari. *Top Skor* hanya kalah dari *Pos Kota* dan *Kompas*. Bahkan, *Top Skor* mengalahkan media-media besar, seperti *Media Indonesia*, *Republika*, dan *Suara Pembaruan*. *Top Skor* adalah harian olahraga pertama di Indonesia dengan berita sepak bola sebagai sajian berita terbanyak. Sementara itu, pembaca tabloid berjenis kelamin laki-laki menempatkan berita sepak bola di urutan pertama alasan mereka

membeli tabloid. Sedangkan pembaca tabloid berjenis kelamin perempuan menjadikan berita sepak bola sebagai alasan terbesar ketujuh untuk membeli tabloid. Berita sepak bola di tabloid juga menjadi pilihan semua kalangan.

Maka, media cetak umum kemudian berbenah diri dengan cara menempatkan berita olahraga sebagai sajian utama mereka dan memberi nama halaman olahraga mereka identik dengan sepak bola, seperti *Sindo* yang menamakan halaman olahraganya dengan *Hattrick*. *Hattrick* diambil dari istilah dalam sepak bola yang berarti seorang pemain mencetak tiga gol dalam satu laga. Berita sepak bola menempati 80% sajian olahraga dalam *Hattrick*, termasuk berita mengenai sepak bola Eropa, yakni Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. *Hattrick* menyediakan satu halaman penuh untuk laporan sepak bola nasional. Pada awal *Sindo* terbit, 2010, *Hattrick* muncul delapan halaman. Namun, kemudian turun menjadi empat halaman.

Menurut Decky Irawan Jasri, berita olahraga identik dengan berita sepak bola, sehingga hampir semua media olahraga, baik yang terbit khusus sebagai koran harian olahraga maupun sisipan di media induknya, menjadikan berita sepak bola sebagai sajian utama (Wawancara dengan Decky Irawan Jasri, 14 Desember 2014).

PEMBAHASAN

Pengelola media menyadari bahwa sepak bola merupakan olahraga terpopuler di Indonesia, sehingga berita-berita yang berkaitan dengan sepak bola selalu menarik

bagi konsumen. Terlepas dari keberpihakan masing-masing media kepada pihak-pihak yang berkonflik, konflik tersebut telah dikomodifikasi sedemikian rupa guna menghasilkan sejumlah profit.

Pengelola media menyusun berbagai macam strategi dalam mengemas teks-teks berita tersebut sehingga menarik bagi pembaca. Salah satu strategi yang ditempuh media yakni objek-objek pemberitaan dikemas dalam posisi yang saling berhadap-hadapan, sehingga menimbulkan kesan dramatis. Dramatisasi ini diharapkan menimbulkan *curiosity effect*, sehingga pembaca tertarik mengikuti pemberitaan-pemberitaan tersebut. Kemudian, teks-teks berita media tidak lagi menjadi sarana penyadaran dan pencerahan pemikiran publik, namun tak lebih sekadar sebagai hiburan.

Strategi Kompas-Gramedia dengan membelah keberpihakan (*Bola* mendukung KPSI dan *Kompas* memilih tidak memberitakan) menunjukkan bahwa strategi tersebut dipilih untuk melayani kepentingan konsumen mereka. Hal tersebut bukanlah suatu kebetulan, namun sebuah *grand design* yang dibuat supaya kepentingan profit tetap terjaga.

Demikian pula dengan *Sindo* yang memilih mendukung PSSI. Hal tersebut merupakan *grand strategy* korporasi MNC dalam melipatgandakan keuntungan. Keputusan MNC membeli hak siar LPI jilid II membuat *Sindo* tidak memiliki pilihan lain karena harus mengikuti kebijakan induk usaha yang menaunginya.

Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC *Group*, dan Jakob Oetama, pemilik

Kompas-Gramedia, tahu betul profit bisnis media. Keduanya membuktikan bahwa bisnis media bisa menjadi industri yang menguntungkan. Majalah *The Globe Asia*, pada 2012, menempatkan Harry Tanoesoedibjo menjadi orang terkaya ke-26 di Indonesia dengan akumulasi kekayaan sebesar US\$ 980 juta. Sedangkan Jakob Oetama, orang terkaya urutan ke-48 dengan akumulasi kekayaan sebesar US\$ 670 juta.

Menurut Douglas Kellner (2009), pendekatan ekonomi politik melihat kaum kapitalis bekerja melalui mode produksi yang dominan menurut logika komodifikasi dan akumulasi modal. Budaya produksi dan distribusi diatur menurut sistem keuntungan dan orientasi pasar.

Praktik penguasaan oligopoli ini, menurut Herbert Schiller, seperti dikutip oleh Downing (2011), disebut sebagai aparatus budaya informasional untuk memproduksi kebudayaan seturut kehendak kapital. Media massa merupakan alat yang ampuh untuk membentuk, merawat, serta mereproduksi kebudayaan dan selera masyarakat. Media massa tidak memberikan pilihan-pilihan individual kepada penontonnya, namun melakukan distribusi informasi yang bersifat massal karena aspek massal itu membangun selera yang mendukung aktivitas jual beli produk dalam kapitalisme.

Akumulasi keuntungan masyarakat satu produk dibeli oleh banyak konsumen. Publik tidak merasa bahwa kesadaran mereka sedang direayasa dan dibentuk preferensi estetikanya untuk melanggengkan kapitalisme. Efek lain dari situasi ini adalah adanya *cultural*

domination karena hanya corak kebudayaan yang sesuai dengan kehendak kapital lah yang diakomodasi dan dikembangkan di media massa. Media massa tidak lagi mengakomodasi kepentingan kebudayaan di luar corak tersebut.

Peristiwa konflik persepakbolaan di Indonesia, dalam dimensi ekonomi dan politik, diproduksi menjadi isu yang melegitimasi posisi strategis kekuasaan elit persepakbolaan. Media dan wartawan hanyut dalam penciptaan atau pengukuhan kekuasaan tersebut. Peristiwa itu dikemas menarik dalam teks untuk konsumsi publik. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh media adalah memberi kesan keliru atas suatu peristiwa. Media ataupun wartawan sering terhanyut dalam praktik pemberian kesan keliru tersebut dengan pemberitaan yang mengarah pada penciptaan atau pengukuhan stereotip. Media mengukuhkan atau memperkuat kepercayaan, sikap, nilai, dan opini itu. Pesan yang dianggap mengubah sikap, sering kali hanya merupakan pengukuhan sikap yang sudah ada.

Sindo adalah contoh betapa kepentingan pemilik media sangat menentukan isi media. Di awal konflik persepakbolaan, pada 2011, *Sindo* bersikap netral terhadap konflik tersebut. *Sindo* seakan-akan tidak ingin masuk dalam pusaran konflik. Namun, setelah induk usaha yang menaunginya membeli hak siar LPI jilid II, netralitas itu lenyap. *Sindo* memberikan ruang yang luas untuk pemberitaan mengenai PSSI Djohar Arifin dan eksponen LPI. Bahkan, berita-berita mengenai ISL sama sekali tidak diturunkan.

Fenomena konglomerasi membawa potensi bahaya yang tidak dapat diremehkan. *Pertama*, arus informasi ke publik menjadi monolitik. Terpusatnya kepemilikan media tidak memenuhi kaidah keragaman kepemilikan yang berakibat pada sedikitnya keberagaman isi. *Kedua*, terabaikannya agenda publik. Sesuatu yang ditampilkan dalam media disesuaikan dengan alur kepentingan pemilik modal. *Ketiga*, terjadi migrasi peran warga negara yang direduksi semata-mata menjadi konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat tidak memiliki hak berpartisipasi dalam menentukan informasi yang diberitakan di media. *Keempat*, merosotnya mutu jurnalisme yang dipraktikkan media. Kekuatan pasar mendominasi logika produksi karena alokasi dana liputan dialihkan untuk strategi pemasaran. *Kelima*, konglomerasi membuat pemilik media menjadi tiran dalam dirinya sendiri (Utomo, 2013).

Michel Foucault mengutarakan bahwa kekuasaan tertentu ditegakkan dan dilaksanakan melalui wacana dan sebuah kekuasaan jelas memiliki pengaruh. Suatu dominasi tertentu menggunakan wacana sebagai elemen taktis untuk memengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini terkait dengan pembangunan sebuah dominasi atau pelanggaran kekuasaan. Menurut Foucault, seperti yang dikutip Aditjondro (1994, h. 58-59), ciri utama diskursus adalah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan diskursus yang berbeda satu sama lain. Namun, kekuasaan memilih dan mendukung diskursus tertentu, sehingga diskursus tersebut menjadi dominan, sedangkan diskursus lainnya terpinggirkan.

Menurut Foucault, seperti dikutip Barker (2004), pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Diskursus dicirikan oleh batas bidang dari objek, yakni definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak. Diskursus tertentu yang membatasi pandangan khalayak mengarahkan jalan pikiran tertentu dan menghayati itu sebagai sesuatu yang benar.

SIMPULAN

Kompas, *Bola*, dan *Sindo* adalah media massa yang merupakan bagian dari dua rantai konglomerasi media di Indonesia. *Kompas* dan *Bola* dikendalikan oleh Kompas-Gramedia Group, sedangkan *Sindo* di bawah payung usaha MNC Group. Ketiga media tersebut belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik yang berlangsung. Media-media tersebut justru menjadi corong bagi elit-elit yang berkonflik. Media massa nyaris tak memiliki idealisme dan konsistensi atas misi penyampaian kebenaran. Kebebasan pers pun hanya dipahami sebagai bebas dari intervensi negara dan aparat militer, namun belum dipahami sebagai bebas dari intervensi kepentingan pemilik dan tekanan pasar. Sementara itu, para pekerja media terjebak pada pelayanan terhadap kepentingan pemodal dan pasar, sehingga tidak dapat bebas mempraktikkan aturan-aturan dan etika profesi.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditjondro, G. J. (1994). Pengetahuan-pengetahuan lokal yang tertindas: Menoropong gerakan lingkungan di Indonesia melalui konsep kuasa/ pengetahuan Foucault. *Jurnal Kalam*, No. 1.
- Aur, A. (2005). Pascastrukturalisme Michel Foucault dan gerbang menuju dialog antarperadaban. Dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (eds.), *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Kanisius.
- Bangun, H. Ch. (2010, Februari 4). PWI-KONI lakukan kongres sepak bola. *Kompas.com*. <<http://tekno.kompas.com/read/2010/02/04/04333971/pwi-koni.lakukan.kongres.sepak.bola>>
- Barker, C. (2004). *Cultural studies: Teori & praktek* (terjemahan). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Black, J., at all. (1993). *Doing ethic in journalism: A handbook with case studies*. Birmingham, UK: Greencastle.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. <https://monoskop.org/images/4/43/Bourdieu_Pierre_Language_and_Symbolic_Power_1991.pdf>
- Croteau, D. & Hoynes, W. (2006). *The business of media: Corporate media and the public interest*. California, USA: Pine Forge Press (an Imprint Sage Publication Inc).
- Detik.com (2011, Februari 9). PSSI tunggu dewan pers panggil dua media massa. <<http://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/1567609/pssi-tunggu-dewan-pers-panggil-dua-media-massa>>
- Downing, J. D. H. (2011). Media ownership, concentration and control: The evolution debate. Dalam Janet Wasko, Graham Murdock dan Helena Sousa, *The handbook of political economy of communication*, (eds.). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power*. Edinburgh, Scotland: Pearson Education Limited.
- Gee, J. P. (1999). *An introduction to discourse analysis: Theory and method*. New York, USA: Routledge.

- Golding, P. & Murdock, G. (1997). *The political economy of media*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Grant, W. (2007). An analytical framework for a political economy of football. *Palgrave Journal*, Vol 2.
- Jasri, D. I. (2012, Januari 1). PSSI Tidak Gentar KPSI. *Seputar Indonesia*.
- Kellner, D. (2009). *Media industry, political economy and media/cultural studies*. Dalam Jennifer Holt dan Alisa Perren (eds.), *Media industry: History, theory and method*. West Sussex, UK: Wiley Blackwell.
- Kennedy, D. & Kennedy, P. (2007). Toward a marxist political economy of football supporters. *Capital & Class Journal*.
- Kongres Tahunan PSSI, verifikasi diabaikan. (2012, Januari 12-13). *Tabloid Bola*.
- Madeiro, G. (2007). Sport and power: Globalization and merchandizing in the soccer world. *Society and Business Review*, Vol. No. 3, 287-298.
- McQuail, D. (2005). *McQuails mass communication theory*. London, UK: Sage Publication.
- Mosco, V. (2010). *The political economy of communication* (2nd ed). London, UK: Sage Publication.
- Utomo, W. P. (2013, September 27). Media kooperasi, alternatif di era konglomerasi media?. *Harian Indoprogres*.
- Wilson, J. (1996). *Understanding journalism: A guide to issues*. New York, USA: Routledge.
- Yosia, A. (2011, Desember 15-16). Djohar Arifin Husin: Saya tidak melanggar statuta! *Tabloid Bola*.
- Yosia, A. (2012, Maret 19-21). KLB KPSI “penggulingan” di Ancol. *Tabloid Bola*.

